



**P E N E T A P A N**

Nomor **0225/Pdt.P/2018/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**Tahang bin Kadafi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Teppoe, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Hamida binti Hasan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Teppoe, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0225/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 20 September 2018, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Teppoe pada tanggal 21 Pebruari 1973, dan Pemohon II lahir di Makassar pada tanggal 15 Mei 1975, berdasarkan Kartu Keluarga No : 7312020508101211 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 25 Januari 2017.
2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1994 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Teppoe, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dihadapan penghulu dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2018/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng bernama Dg.Taba, dengan wali nikah bernama Hasan selaku orang tua kandung Pemohon II, dengan dua orang saksi nikah bernama Sudirman dan Juhari Sappe serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.150.000 dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Pemohon II, kemudian pindah ditempat kediaman bersama, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri bahkan sudah dikeruniai 4 orang anak masing-masing bernama Arham bin Tahang umur 23 tahun, Arfianti binti Tahang umur 21 tahun, Arsandi bin Tahang umur 17 tahun serta Arfan bin Tahang umur 13 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Tahang bin Kadafi**) dengan Pemohon II (**Hamida binti Hasan**) yang dilaksanakan pada tanggal

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2018/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 1994 di Teppoe, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sah menurut hukum.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0225/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 25 September 2018, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Sehelai fotokopy Kartu Penduduk atas nama Tahang Nomor 7312022102730002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng tanggal 24 Oktober 2012 telah dicocokkan dengan aslinya Kode P1.
2. Sehelai fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamida, Nomor 7312025505750003 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng, tanggal 24 Oktober 2012 telah dicocokkan dengan aslinya Kode P2.
3. Sehelai fotokopy Kartu Keluarga an. Tahang, nomor 7312020508101211 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng tanggal 25 Januari 2017 telah dicocokkan dengan aslinya Kode P3.

B. Saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu : Madde bin Nurun Jamide, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada 10 Oktober 1994, di Teppoe, Kelurahan galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkankan Imam Mesjid bernama Dg. Taba dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada mahar berupa uang sebesar Rp.150.000,- serta disaksikan oleh saksi nikah bernama Sudirman dan Juhari Sappe.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang Pemohon II adalah berstatus perawan.
- Bahwa selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 orang anak
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun undang-undang.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk urus akta nikah.

Saksi kedua :Juhari Sappe bin Sappe, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada 10 Oktober 1994, di Teppoe, Kelurahan galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkankan Imam Mesjid bernama Dg. Taba dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada mahar berupa uang sebesar Rp.150.000,- serta disaksikan oleh saksi nikah bernama Sudirman dan Juhari Sappe.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang Pemohon II adalah berstatus perawan.
- Bahwa selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 orang anak

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun undang-undang.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk urus akta nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon dipersidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon penetapan

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Teppoe, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 10 Oktober 1994, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan untuk mendapatkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada 10 Oktober 1994 di Teppoe, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, diaqadkan oleh Imam Mesjid bernama Dg. Taba, dengan wali ayah kandung

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Hasan, ada mahar berupa uang sebesar Rp.150.000,- serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: Sudirman dan Juhari Sappe.

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Teppoe, Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 10 Oktober 1994.
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2018/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena keadaan yang memaksa atau hal-hal lain, tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Penetapan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (Tahang bin Kadafi) dengan Pemohon II (Hamida binti Hasan) yang dilaksanakan di Teppoe, Kelurahan

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2018/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galung, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng pada tanggal 10 Oktober 1994, sah menurut hukum.

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh, Drs. M.Ynus.K S.H, M.H. sebagai Hakim tunggal dalam sidang terpadu di Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim yang bersidang,

Drs. M.Yunus.K S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp nihil
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)